



# RENCANA KERJA DPMPTSP 2025





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena Berkat dan Rahmat-Nyalah sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan Program dan Kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), Efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana Kerja tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Kami berharap bahwa perencanaan kerja yang merupakan dokumen program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggungjawab.

Merealisasikan perencanaan yang telah di susun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera di realisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara akan sangat di perlukan demi terwujudnya akuntabilitas, kinerja pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di Daerah.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga memungkinkan untuk di lakukan perubahan-perubahan dan perbaikan - perbaikan yang di anggap strategis dan sejalan dengan perkembangan pembangunan Daerah.



**Ir. HARLI PATRIATNO, M.Si**

Pangkat :  
NIP. :

Pembina Utama Muda / IV.C  
: 19670503 199103 1 015



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3.2 Maksud .....	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA Tahun 2022.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Capaian Renstra Perangkat Daerah di Tahun 2022.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara.....	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOARAJA UTARA.....	36
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	36
3.2 Usulan Inovasi Perangkat Daerah .....	37
3.3 Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	45
BAB V PENUTUP .....	66



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memegang peranan strategis dalam mendukung investasi dan pelayanan perizinan yang efisien di daerah. Dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan daya saing melalui pengelolaan investasi yang optimal dan layanan yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan rencana kerja yang sistematis dan terarah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan kebijakan pemerintah daerah, prioritas pembangunan nasional, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini menjadi acuan dalam merencanakan program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

#### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor





- 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);
  9. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara;
  10. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026.



### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

- a. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara
- b. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

#### **2. Tujuan**

- a. Tujuan Memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan tugas DP MPTSP pada tahun 2025
- b. Memastikan program dan kegiatan yang direncanakan sejalan dengan visi, misi, dan sasaran strategis organisasi.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, keterkaitan antara Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara dengan dokumen RKPD Toraja Utara dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan



pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Renstra Perangkat Daerah di Tahun 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 dan Perkiraan pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 di tahun Keempat (Tahun 2024).

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, Analisis Kinerja Pelayanan Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Utama. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun



terhadap Indikator Kinerja Utama. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi berisikan uraian mengenai: Tingkat Pelayanan, Permasalahan dan Hambatan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis berupa rekomendasi untuk dituangkan dalam program dan kegiatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara

review terhadap rancangan awal ini bertujuan untuk memberikan masukan konstruktif yang dapat memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah ke depan.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DP MPTSP KABUPATEN TORAJA UTARA

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra sesuai tahun berkenaan. Tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator tujuan dan indikator sasaran beserta target Tahun 2025.

3.2 Program dan Kegiatan Berisikan tabel rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Selain itu, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program mendukung pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026.

Ruang lingkup evaluasi mencakup:

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2023
2. Analisis Kinerja Pelayanan
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2023**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menganalisis pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) yang berlaku untuk periode 2021-2026 dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai target-target yang belum tercapai.

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023, maka Kinerja Program DPMPTSP masuk kategori sangat tinggi dengan realisasi Fisik 98% dan realisasi Keuangan 90%

Hasil Evaluasi terhadap realisasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 adalah sebagaimana table berikut:



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Buntu Pepasan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Buntu Pepasan Tahun 2023  
(Target berdasarkan Renstra Kecamatan Buntu Pepasan Tahun 2021-2026)

KODE REKENING					Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun S/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMPTSP S/d Tahun Berjalan	
									Target Renja DPMPTSP Tahun (2022)	Realisasi Renja DPMPTSP Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%



2	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
2	18	01	2,01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan di tetapkan	2	1	2	1	50	2	4	200
2	18	01	2,01	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SPKD yang tersusun	1	1	1	1	100	1	3	300
2	18	01	2,01	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SPKD yang tersusun	1	1	1	1	100	1	3	300
2	18	01	2,01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun dan dilaporkan	7	1	1	1	100	7	9	128,57143
2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2	18	01	2,02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	30	27	28	28	100	30	85	283,33333
2	18	01	2,02	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terusun	1	1	1	1	100	1	3	300
2	18	01	2,02	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	1	1	1	100	1	3	300
2	18	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	18	01	2,03	000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah DPMPTSP yang tersusun	2	2	2	2	100	2	6	300



2	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2	18	01	2,05	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan nya yang tersedia	50	0	0	0	0	50	50	100
2	18	01	2,05	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasrkan Tugas dan Fungsi	1	0	0	0	0	1	1	100
2	18	01	2,05	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan -Undangan	4	3	2	2	100	4	9	225
2	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	18	01	2,06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan	8	8	8	10	125	8		0





						Perlengkapan Kantor yang tersedia								
2	18	01	2,06	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5	5	10	22	275	5	32	640
2	18	01	2,06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	12	12	150	12	36	300
2	18	01	2,06	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	12	12	12	150	12	36	300
2	18	01	2,06	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	12	12	12	12	150	12	36	300
2	18	01	2,06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	12	12	12	12	150	12	36	300
2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2	18	01	2,08	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	300	150	200	66	33	300	516	172
2	18	01	2,08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Satuan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpakai	12	12	12	12	100	12	36	300
2	18	01	2,08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	36	300
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	18	01	2,09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang akan terpelihara	3	3	3	3	100	3	9	300
2	18	01	2,09	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	10	18	10	10	100	10	38	380



2	18	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi	1	1	1	1	100	1	3	300
2	18	01	2,13		Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi yang Terselenggara	0	0	0	0	0	0	0	0
2	18	01	2,13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2	18	02	2,01	000 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan	2	4	1	1	100%	2	7	350
2	18	02	2,01	000 3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1	0	1	1	100%	1	2	200
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	18	02	2,02	000 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	1	0	1	1	100%	1	2	200
2	18	02	2,02	000 4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100%	1	3	300



						Kota yang tersusun								
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	18	03	2,01	000 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang terlaksana	1	1	1	1	100%	1	3	300
2	18	03	2,01	000 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	3	300
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	18	04	2,01	000 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah yang terlaksana	1	1	1	1	100%	1	3	300
2	18	04	2,01	000 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik yang tersedia	1060	1782	1100	2150	195,50%	1060	4992	470,9434



2	18	04	2,01	000 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko yang tersedia dan dikelola	1	1	1	1	100	1	3	300
2	18	04	2,01	000 8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko yang terlaksana	1050	1782	82	82	100%	1050	2914	277,52381
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	18	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



2	18	05	2,01	000 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7	11	7	7	100%	7	25	357,14286
2	18	05	2,01	000 5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha yang terselenggara	205	205	205	205	100%	205	615	300
2	18	05	2,01	000 6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Penanaman Modal yang terlaksana (Pengawasan Pelaporan Perusahaan)	13	16	11	13	118%	13	42	323,07692
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	18	06	2,01	000 2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang tersusun	3	3	3	3	100	3	9	300%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan, terutama dalam hal perizinan dan investasi. Kinerja pelayanan DPMPTSP menjadi tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana lembaga ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Analisis kinerja pelayanan diperlukan untuk mengevaluasi pencapaian target, mengidentifikasi hambatan, serta menemukan peluang perbaikan yang dapat mendorong peningkatan kualitas layanan. Melalui pendekatan ini, DPMPTSP dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, berikut adalah realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**  
**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No.	Indikator Kinerja Utara	Sasaran	Indikator Tujuan dan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan pelayanan Publik dan penanaman modal	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Pelayanan Publik dan Penanaman Modal	Nilai Sakip	NA	CC (55)	CC (55)	CC (55)	B (65)	B (65)	BB (67,23)			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82	83	84	85	85	86,53			
3	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Meningkatnya daya tarik Investasi	Jumlah Investor	122	124	126	128	130	132	1.090			
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Investasi	143.379.000	145.729.475.420	148.079.950.830	150.430.426.240	152.780.901.650	155.131.377.060	905.415.871.635			



## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), terdapat berbagai isu strategis yang menjadi perhatian dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Sebagai salah satu dinas yang berperan penting dalam peningkatan investasi dan pelayanan publik, DPMPTSP menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif hingga optimalisasi pelayanan perizinan yang transparan, cepat, dan efisien. Selain itu, kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, regulasi nasional, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat turut menambah urgensi untuk mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu penting yang memengaruhi kinerja organisasi ini.

**Tabel 2.3.1**

### **Permasalahan dan Solusi DPMPTSP**

No	Permasalahan	Dampak	Solusi yang Diusulkan	Keterangan
1	Proses perizinan yang masih lambat dan birokratis	Menghambat minat investor dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.	Digitalisasi layanan perizinan melalui sistem OSS dan pelatihan petugas untuk meningkatkan efisiensi kerja.	Butuh dukungan anggaran dan SDM IT.
2	Kurangnya promosi potensi investasi daerah	Rendahnya daya tarik Kabupaten Toraja Utara sebagai tujuan investasi, terutama dari investor luar.	Melaksanakan kampanye investasi melalui media digital, forum bisnis, dan pameran tingkat nasional/internasional.	Kolaborasi dengan instansi terkait.
3	SDM yang belum memadai dalam hal kompetensi teknis perizinan dan investasi	Rendahnya kualitas pelayanan publik dan kurangnya inovasi dalam mendukung peningkatan investasi.	Mengadakan pelatihan teknis secara berkala dan merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan.	Perlu sinergi dengan lembaga pelatihan.
4	Infrastruktur layanan yang terbatas	Tidak optimalnya kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan DPMPTSP.	Meningkatkan fasilitas layanan, termasuk penambahan ruang dan peralatan modern untuk pelayanan terpadu.	Disesuaikan dengan anggaran daerah.

5	Kurangnya koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait	Program tidak sinkron sehingga tujuan investasi tidak tercapai secara maksimal.	Mengadakan rapat koordinasi rutin dan forum diskusi dengan OPD serta stakeholder terkait.	Harus dijadwalkan secara berkala.
6	Masih tingginya keluhan masyarakat terhadap pelayanan	Menurunkan tingkat kepuasan masyarakat dan reputasi DPMPTSP.	Mengembangkan mekanisme pengaduan yang responsif serta survei kepuasan pelanggan secara berkala.	Perlu integrasi dengan sistem digital.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang strategis dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Toraja Utara. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah. Dalam proses penyusunannya, diperlukan tinjauan mendalam untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan tidak hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu menjawab isu-isu strategis dan tantangan pembangunan daerah, termasuk optimalisasi pelayanan publik dan peningkatan investasi. Oleh karena itu, review terhadap rancangan awal ini bertujuan untuk memberikan masukan konstruktif yang dapat memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah ke depan.



**RENCANA AWAL RKPD**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TORAJA UTARA**  
**TAHUN 2024**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA AWAL		Hasil Analisis Kebutuhan	
								Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	7	6	8
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			5.660.133.375,00		5.048.147.811,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.660.133.375,00		5.048.147.811,00
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.660.133.375,00		5.048.147.811,00
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 Persen	3.666.000.000,00	100 Persen	4.027.797.811,00
	2	18	01	2 · 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	47.000.000,00	100 Persen	7.953.799,00



							Perangkat Daerah Tepat Waktu				
	2	18	01	2 · 0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	2.500.000,00
	2	18	01	2 · 0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.026.199,00
	2	18	01	2 · 0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	0,00	7 Laporan	1.427.600,00
	2	18	01	2 · 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keungan Tepat Waktu	100 Persen	2.541.000.000,00	100 Persen	3.728.340.413,00
	2	18	01	2 · 0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bul an	0,00	32 Orang/bul an	3.726.346.813,00
	2	18	01	2 · 0 2	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	934.000,00



2	18	01	2 0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	1 Laporan	1.059.600,00
2	18	01	2 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	100 Persen	5.000.000,00	100 Persen	1.361.600,00
2	18	01	2 0 3	00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	2 Laporan	1.361.600,00
2	18	01	2 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata - Rata Nilai Perilaku Pegawai	97 Persen	90.000.000,00	97 Persen	0,00
2	18	01	2 0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	0,00	50 Paket	0,00
2	18	01	2 0 5	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0,00	1 Orang	0,00





2	18	01	2 0 5	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	0,00	4 Orang	0,00
2	18	01	2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	460.000.000,00	100 Persen	156.074.999,00
2	18	01	2 0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	0,00	8 Paket	100.380.000,00
2	18	01	2 0 6	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0,00	5 Paket	2.448.000,00
2	18	01	2 0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	12 Paket	20.824.000,00
2	18	01	2 0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0,00	12 Paket	2.347.999,00
2	18	01	2 0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	0,00



							Undangan yang Disediakan				
	2	18	01	2 · 0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	12 Laporan	30.075.000,00
	2	18	01	2 · 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	333.000.000,00	100 Persen	64.896.000,00
	2	18	01	2 · 0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	0,00	500 Laporan	546.000,00
	2	18	01	2 · 0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	12 Laporan	17.160.000,00
	2	18	01	2 · 0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	12 Laporan	47.190.000,00



2	18	01	2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik	100 Persen	190.000.000,00	100 Persen	69.171.000,00
2	18	01	2 0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	0,00	4 Unit	48.360.000,00
2	18	01	2 0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0 Unit	9.980.000,00
2	18	01	2 0 9	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	1 Unit	10.831.000,00
2	18	01	2 1 3		Penataan Organisasi	Jumlah Laporan	0 Persen	0,00	0 Persen	0,00
2	18	01	2 1 3	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00



49	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi Yang Dimanfaatkan Oleh Investor	100 Persen	750.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00
	2	18	02	2 · 0 1		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor Yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/Insentif Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	400.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00
	2	18	02	2 · 0 1	00 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	250.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00
	2	18	02	2 · 0 1	00 03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	0,00
	2	18	02	2 · 0 2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah Kabupaten Yang Telah Disusun Kedalam Peta	100 Persen	350.000.000,00	100 Persen	0,00



							Potensi Investasi Kabupaten				
	2	18	02	2 · 0 2	00 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	0,00
	2	18	02	2 · 0 2	00 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	0,00
50	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	100 Persen	115.000.000,00	100 Persen	43.877.000,00
	2	18	03	2 · 0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal	100 Persen	115.000.000,00	100 Persen	43.877.000,00
	2	18	03	2 · 0 1	00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	12.728.000,00
	2	18	03	2 · 0 1	00 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	31.149.000,00



51	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	100 Persen	427.000.000,00	100 Persen	137.342.000,00
	2	18	04	2 · 0 1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	1100 Izin	427.000.000,00	1100 Izin	137.342.000,00
	2	18	04	2 · 0 1	00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	84 Dokumen	77.000.000,00	84 Dokumen	0,00
	2	18	04	2 · 0 1	00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1150 Pelaku Usaha	130.000.000,00	1150 Pelaku Usaha	35.000.000,00



	2	18	04	2 · 0 1	00 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha	90.000.000,00	1 Pelaku Usaha	28.398.000,00
	2	18	04	2 · 0 1	00 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 % Kegiatan Usaha	130.000.000,00	100 % Kegiatan Usaha	73.944.000,00
52	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	100 Persen	561.800.000,00	100 Persen	784.175.000,00



2	18	05	2 · 0 1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100 Pesen	561.800.000,00	100 Pesen	784.175.000,00
2	18	05	2 · 0 1	00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha.	150.000.000,00	7 Kegiatan Usaha.	121.853.000,00
2	18	05	2 · 0 1	00 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	207 Pelaku Usaha	150.000.000,00	207 Pelaku Usaha	428.562.000,00





	2	18	05	2 0 1	00 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha	261.800.000,00	15 Kegiatan Usaha	233.760.000,00
53	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 Persen	140.333.375,00	100 Persen	24.956.000,00
	2	18	06	2 0 1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Lembaga Lainnya Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Perizinan Berusaha	3 Aplikasi	140.333.375,00	3 Aplikasi	24.956.000,00



	2	18	06	2 · 0 1	00 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	140.333.375,00	3 Dokumen	24.956.000,00
	<b>J U M L A H</b>								<b>5.660.133.375,00</b>		<b>5.048.147.811,00</b>

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN DP MPTSP KABUPATEN TORAJA UTARA

### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan nasional menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pemerintah menetapkan tema besar, yaitu *“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*, dengan fokus pada tujuh prioritas nasional:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan Pelayanan dasar;
6. Pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan dalam RKPD Toraja Utara 2024 selaras dengan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dirumuskan tidak hanya mampu menjawab tantangan lokal, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara sinergis dan efektif.

Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan mencapai target pembangunan berkelanjutan, **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)** menetapkan arah kebijakan strategis tahun 2024 yang berfokus pada peningkatan kualitas investasi,

pemerataan pembangunan, dan penguatan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi global. Kebijakan ini dirancang untuk mengoptimalkan peran investasi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendukung transformasi ekonomi berbasis digital dan ramah lingkungan. Melalui pendekatan yang terintegrasi dengan prioritas nasional, BKPM berkomitmen untuk membangun ekosistem investasi yang transparan, efisien, dan berkeadilan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun arah kebijakan BKPM tahun 2024 adalah:

**1. Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Daerah:**

Kabupaten memastikan program dan kegiatan pembangunan daerah mendukung prioritas nasional yang tercantum dalam RKPD Nasional 2024.

**2. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal:** Mengembangkan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, atau UMKM, sesuai karakteristik wilayah.

**3. Penguatan Kesejahteraan Sosial:** Fokus pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.

**4. Transformasi Ekonomi Daerah:** Mendorong investasi, inovasi teknologi, dan digitalisasi di berbagai sektor untuk meningkatkan daya saing lokal.

**5. Pembangunan Berkelanjutan dan Berbasis Lingkungan:** Menjaga kelestarian lingkungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

**3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun untuk memastikan optimalisasi peran dinas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta menarik investasi berkualitas. Renja ini menjadi panduan strategis bagi DPMPTSP dalam merumuskan langkah-langkah prioritas untuk menciptakan iklim

investasi yang kondusif, mempermudah proses perizinan, dan memperkuat kontribusi sektor investasi terhadap pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada visi dan misi pemerintah daerah, Renja DPMPTSP bertujuan untuk mendorong transformasi pelayanan yang inovatif dan inklusif guna mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi investasi, dan penguatan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Strategi ini bertujuan untuk mendorong investasi berkualitas, mempercepat perizinan, dan mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah strategi dapat diterapkan DPMPTSP :

1. Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Publik
2. Strategi Optimalisasi Investasi
3. Strategi Penguatan Koordinasi dan Regulasi
4. Strategi Penguatan Monitoring dan Evaluasi
5. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
6. Strategi Pemberian Insentif dan Kemudahan

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Visi Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing  
Misi Ke-4 Reformasi Birokrasi

Tujuan Ke-4 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan reformasi Birokrasi				
Sasaran ke-4 Kabupaten	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Pelayanan Publik dan Penanaman	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Pelayanan Publik dan Penanaman	Meningkatkan kualitas sistem pelaporan kesekretariatan DPMPTSP	Menyusun dan mengintegrasikan data-data pendukung sistem pelaporan
Sasaran ke-5 Kabupaten	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan pelayanan penanaman modal terutama pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Merumuskan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan profesionalisme sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana perkantoran guna menunjang kegiatan penanaman modal serta perizinan dan Non Perizinan
Tujuan Ke-5 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata				
Sasaran ke-6 Kabupaten	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan



Meningkatnya Kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	Meningkatkan Daya Tarik Investasi	Meningkatnya daya tarik investasi	Meningkatkan ketersediaan data, informasi dan dokumen rencana pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan serta peran serta masyarakat serta institusi pemerintah dalam perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi investasi dan penyusunan aturan mengenai penanaman modal, potensi, investasi serta merumuskan sistem peningkatan investasi melalui promosi, kerjasama investasi, pengendalian investasi dan koordinasi dengan masyarakat dinas/badan/kantor serta kelembagaan lainnya
---	-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya tarik investasi daerah melalui serangkaian program strategis. Program-program tersebut meliputi pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi digital untuk mempercepat proses perizinan, penyelenggaraan sosialisasi investasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pelayanan dan penanaman modal. Selain itu, DPMPTSP juga merancang program fasilitasi investor, seperti pendampingan administrasi dan promosi potensi daerah ke tingkat nasional maupun internasional. Dengan pelaksanaan program ini, DPMPTSP berharap



dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, data serta informasi terkait program dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2025 disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam menganalisis dan membandingkan berbagai aspek penting, seperti tujuan program, indikator kinerja, alokasi anggaran, dan pencapaian target. Melalui tabel ini, diharapkan informasi yang disampaikan dapat lebih efektif mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Berikut adalah tabel yang memuat rincian program kegiatan DPMPTSP tahun 2025.

**TABEL 3.3.1**  
**REKAPITULASI URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN**  
**PENDANAAN TA. 2025**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Belanja Operasi	Jumlah (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	18	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 27.340.600	Rp. 27.340.600
2	18	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 1.802.200	Rp. 1.802.200
2	18	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 1.411.000	Rp. 1.411.000
2	18	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 9.019.200	Rp. 9.019.200





2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	18	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Rp. 3.457.437.665	Rp. 3.457.437.665
2	18	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 1.477.000	Rp. 1.477.000
2	18	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 2.514.800	Rp. 2.514.800
2	18	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
2	18	01	2,03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 7.069.800	Rp. 7.069.800
2	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	18	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 0	
2	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	18	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 66.870.000	Rp. 66.870.000
2	18	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 9.168.000	Rp. 9.168.000
2	18	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 26.517.500	Rp. 26.517.500
2	18	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 5.108.151	Rp. 5.108.151
2	18	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 92.597.200	Rp. 92.597.200
2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			



2	18	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 10.650.000	Rp. 10.650.000
2	18	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 333.969.900	Rp. 333.969.900
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	18	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 46.435.000	Rp. 46.435.000
2	18	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 7.980.000	Rp. 7.980.000
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>			
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	02	2,01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 195.460.850	Rp. 195.460.850
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>			
2	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	03	2,01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 54.161.800	Rp. 54.161.800
2	18	03	2,01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 17.812.000	Rp. 17.812.000
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			
2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			



2	18	04	2,01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 36.751.000	Rp. 36.751.000
2	18	04	2,01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 122.786.200	Rp. 122.786.200
2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			
2	18	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	05	2,01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 11.989.400	Rp. 11.989.400
2	18	05	2,01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 30.960.000	Rp. 30.960.000
2	18	05	2,01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 37.052.200	Rp. 37.052.200
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			
2	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	06	2,01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 15.965.400	Rp. 15.965.400



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP**

Dalam bab ini, diuraikan secara rinci program-program prioritas, kegiatan-kegiatan pendukung, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi DPMPTSP. Selain itu, strategi pelaksanaan yang terencana dan berbasis hasil juga dijelaskan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dari setiap langkah yang diambil. Rencana kerja ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam menghadapi tantangan serta mengoptimalkan potensi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah



**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TORAJA UTARA  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERA NGKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB		
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	L OKAS I	SUMB ER DANA	PRIORITAS				TAR GET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERA H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						6.666.379.308,00							7.211.694.727,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.586.379.308,00							7.091.694.727,00			
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6.586.379.308,00							7.091.694.727,00			
1,	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.091.903.946,00						-	4.502.218.183,00			



2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.810.903.946,00			-	-	-	-	2.970.218.183,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN

48



	03.00 05															
			Jumlah Laporan Rekonsilia si dan Penyusun an Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Lapor an	5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/De sa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU
	2.18. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU
	2.18. 01.2. 05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan				1 Orang	30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/De sa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU
	2.18. 01.2. 05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														





			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				4 Orang	30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	560.000.000,00			-	-	-	-	585.000.000,00	DINAS PENANAMAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	90.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang				5 Paket	30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



			<i>Disediakan</i>						a Kel/Desa	SI UMUM							NAN TERPA DU SATU PINTU
	2.18. 01.2. 06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	80.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU	
	2.18. 01.2. 06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	40.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU	
	2.18. 01.2. 06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan</i>				12 Doku men	20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU	



			yang Disediaka n													SATU PINTU
	2.18. 01.2. 06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyeleng garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lapor an	300.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/De sa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU
	2.18. 01.2. 08 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	396.000.000,00			-	-	-	-	580.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU
	2.18. 01.2. 08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat				500 Lapor an	5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/De sa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU



	2.18. 01.2. 08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n				12 Lapor an	70.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/De sa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU
	2.18. 01.2. 08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n				12 Lapor an	321.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/De sa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU
	2.18. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	220.000.000,00			-	-	-	-	230.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU
	2.18. 01.2. 09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														



			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	120.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/De sa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/De sa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,	2.18.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	<b>1.042.139.000,00</b>						-	<b>1.050.000.000,00</b>	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	550.000.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



	2.18. 02.2. 01.00 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18. 02.2. 01.00 03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PM DN) dengan UMKM di daerah				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18. 02.2. 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	492.139.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18. 02.2. 02.00 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														



			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semudesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	292.139.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semudesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3,	2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	<b>154.832.080,00</b>						-	<b>164.122.005,00</b>	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	154.832.080,00			-	-	-	-	164.122.005,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														



			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	54.832.080,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		104.122.005,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4,	2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	535.957.200,00						-	568.114.632,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	535.957.200,00			-	-	-	-	568.114.632,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														





			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				88 Doku men	90.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/De sa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPA DU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1150 Pelaku Usaha	135.957.200,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/De sa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		138.114.632,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPA DU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														



			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten /Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				1100 Kegiatan Usaha	210.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PENANAMAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



5,	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	595.508.000,00						-	631.238.480,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	595.508.000,00			-	-	-	-	631.238.480,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.00.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				7 Kegiatan Usaha	180.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.00.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi				209 Pelaku Usaha	170.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU



			Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						Kel/Desa							DU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				15 Kegiatan Usaha	245.508.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		261.238.480,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



6,	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	166.039.082,00						-	176.001.427,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	166.039.082,00			-	-	-	-	176.001.427,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	166.039.082,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		176.001.427,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	URUSAN						80.000.000,00							120.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						80.000.000,00							120.000.000,00	



1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	80.000.000,00						-	120.000.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semudesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semudesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



									Kel/De sa	SI UMUM						TERPA DU SATU PINTU
	X.XX. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU
	X.XX. 01.2. 02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Lapor an	10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/De sa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU
	X.XX. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU



	X.XX. 01.2. 05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an				50 Paket	60.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rante pao, Semu a Kel/De sa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYA NAN TERPA DU SATU PINTU
	J U M L A H							6.666.379.308, 00							7.211.694.727,0 0	





## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dokumen ini mencakup berbagai prioritas kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong investasi yang berkelanjutan, serta memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dengan pelaksanaan Renja 2025, DPMPTSP diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat serta pelaku usaha. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh target yang telah dirumuskan dapat tercapai dengan baik.

Melalui komitmen dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat, DPMPTSP optimis bahwa pelaksanaan Renja 2025 akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Renja ini diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk melangkah menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

KEPALA DPMPTSP



**Ir. HARLI PATRIATNO, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19670503 199103 1 015